

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA,
LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL,
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA)**

Tahun Sidang	: 2006 - 2007
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Ketua KPI
Rapat ke	: 16
Hari, Tanggal	: Senin, 9 Juli 2007
Pukul	: 19.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Dra. Damayanti
Acara	: 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh KPI 3. Tanya jawab 4. Penutup
Hadir	: - 40 Anggota dari 49 Anggota Komisi I DPR RI - Ketua KPI, Sasa Djuarsa Sendjaja, beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KPI pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2007 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Arief Mudatsir Mandan, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap peningkatan kinerja KPI dengan cara-cara dan pembekalan yang lebih akomodatif terhadap setiap aspirasi dan masukan-masukan yang konstruktif baik dari Pemerintah maupun masyarakat luas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, baik mengenai masalah teknis, administratif, maupun isi siaran yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

3. Berkaitan dengan adanya kesamaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh KPI maupun Depkominfo, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, Komisi I DPR RI minta agar duplikasi kegiatan dihilangkan dan agar Komisi I DPR RI memberkan dukungan anggaran yang memadai untuk KPI sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
4. Dalam rangka usaha pemeratakan penyebaran informasi guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Komisi I DPR RI minta agar KPI mendukung hadirnya lembaga penyiaran di daerah sehingga daerah terdepan di perbatasan dan daerah terpencil juga terjangkau oleh siaran radio maupun televisi dalam negeri.
5. Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk mempercepat fasilitasi berdirinya lembaga penyiaran komunitas dan memberdayakannya sebagai lembaga penyiaran yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemberdayaan dan kemajuan masyarakat.
6. Melihat pentingnya rating bagi lembaga penyairan, Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk segera melakukan investigasi dan standarisasi terhadap program acara di lembaga penyiaran agar keberadaan rating tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
7. Mengingat pentingnya fungsi dan tugas KPID di berbagai daerah, Komisi I DPR RI mendesak KPI bersama Pemerintah Daerah terutama Pemerintah dalam negeri untuk turut mendorong lahirnya KPID dan mengembangkannya sebagai lembaga independen dalam melaksanakan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, Komisi I DPR RI minta KPI untuk tetap melaksanakan amant UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termasuk memnuhi tenggang waktu pelaksanaan lembaga penyiaran berjaringan bagi lembaga berjaringan bagi lembaga penyiaran swasta, serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan lembaga penyiaran publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya penyiaran untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB

KETUA RAPAT,

DRS. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.SI.
A-42